

Mitigasi Bencana Untuk Penyandang Disabilitas

Maria Devi¹, Sutarto², Helmi Ismunandar³

¹Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

²Bagian Epidemiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

³Bagian Bedah Orthopaedi dan Traumatologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, didapatkan bahwa selama tahun 2023, terjadi 2.669 bencana alam di seluruh Indonesia. Intensitas kejadian dengan jumlah terbanyak adalah kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.624 kali. Penyandang disabilitas diketahui lebih rentan dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam. Mitigasi sebagai langkah pertama dalam menghadapi bencana, merupakan fase pencegahan yang diikuti oleh fase kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Langkah-langkah untuk mengurangi potensi bahaya dengan penekanan pada upaya Pengurangan Risiko Bencana (DRR) dan Manajemen Risiko Bencana (DRM) yang lebih diutamakan. Beberapa pendekatan inklusif terhadap mitigasi bencana pada penyandang disabilitas, yaitu perencanaan, persiapan, dan pengurangan risiko melalui pelatihan evakuasi, partisipasi penyandang disabilitas yang lebih besar dalam koordinasi dan manajemen bencana, serta manajemen data yang lebih baik sehingga pengintegrasian bukan hanya untuk memenuhi hak asasi manusia, melainkan melalui program dan kebijakan yang efektif dari tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana sesuai dengan jenis dan tipe disabilitas. Keterlibatan individu dengan disabilitas dalam sistem dan proses manajemen bencana pastinya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat dan pemerintah. Orang-orang dengan berbagai disabilitas dari latar belakang yang berbeda memiliki kesempatan untuk bersama-sama merancang kebijakan, sumber daya, atau kegiatan penanggulangan bencana dan rehabilitasi. Artikel ini akan membahas informasi mengenai kesiapsiagaan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana.

Kata Kunci: mitigasi bencana, disabilitas, bencana alam

Disaster Mitigation For People With Disabilities

Abstract

Indonesia is a country with a high level of vulnerability to natural disasters. Based on data from Indonesia's National Disaster Management Agency (BNPB), it was found that in 2023, 2,669 natural disasters occurred throughout Indonesia. The intensity of the incident with the highest number was forest and land fires 1,624 times. People with disabilities are known to be more vulnerable in emergencies caused by natural disasters. Mitigation, as the first step in dealing with disasters, is the prevention phase followed by the preparedness, emergency response and recovery phases. Measures to reduce potential hazards with an emphasis on Disaster Risk Reduction (DRR) and Disaster Risk Management (DRM) efforts are prioritized. Some inclusive approaches to disaster mitigation for persons with disabilities include planning, preparation, and risk reduction through evacuation training, greater participation of persons with disabilities in disaster coordination and management, and better data management so that integration is not only to fulfill human rights, but through effective programs and policies from pre-disaster, during disaster, and post-disaster stages according to the type and type of disability. The involvement of individuals with disabilities in disaster management systems and processes certainly cannot be achieved without the support and cooperation of all parties, especially the community and government. People with various disabilities from different backgrounds have the opportunity to co-design disaster management and rehabilitation policies, resources or activities. This article will discuss information regarding the preparedness of people with disabilities in the face of disasters.

Keywords: disaster mitigation, disability, natural disaster

Korespondensi: Maria Devi, alamat Jl. Bumi Manti II Lk. I Kampung Baru, Labuhan Ratu, HP 085238386056, e-mail: mariadevi1419@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam¹. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, didapatkan bahwa selama tahun 2023, mulai dari 1 Januari 2023 hingga 17 Desember 2023, terjadi 2.669 bencana alam di

seluruh Indonesia. Intensitas kejadian dengan jumlah terbanyak adalah kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.624 kali, bencana tanah longsor sebanyak 356 kali, bencana banjir 316 kali, bencana puting beliung sebanyak 301 kali, bencana kekeringan sebanyak 37 kali, bencana gempa bumi sebanyak 17 kali, bencana banjir

dan tanah longsor sebanyak 14 kali, dan bencana abrasi sebanyak 4 kali².

Indonesia berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga ketika salah satu lempeng ini bergerak dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Hal ini juga didukung oleh posisi Indonesia yang berada diantara garis khatulistiwa dan memiliki iklim yang tropis dengan dua musim, yang berpotensi menyebabkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan³. Bencana sering kali dianggap sebagai peristiwa alam ekstrem di luar kendali manusia, dan banyak yang menjadi korban. Banyak penelitian telah mengkonseptualisasikan bencana sebagai masalah struktural dalam masyarakat yang menyebabkan kerentanan yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas. Terkadang, penyandang disabilitas diabaikan dan menjadi kelompok terakhir yang mendapatkan perhatian dari program kesiapsiagaan bencana dan bantuan pemulihan jangka panjang⁴.

Menurut *World Health Organization* (WHO) tentang disabilitas⁵ melaporkan bahwa sekitar 1,3 miliar orang atau sekitar 16% dari populasi global saat ini mengalami disabilitas. Penyandang disabilitas diketahui lebih rentan dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam. Bukti saat ini menunjukkan bahwa orang penyandang disabilitas dua hingga empat kali lebih mungkin meninggal atau terluka selama bencana alam dibandingkan dengan populasi umum⁶. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas pada semua tahap proses manajemen bencana, terutama selama perencanaan dan kesiapsiagaan, dapat secara signifikan mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan efektivitas upaya tanggap darurat⁷.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya harus inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tetapi juga melibatkan partisipasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak mereka

dihormati, dilindungi, serta dipenuhi, hal ini penting karena mereka lebih memahami kebutuhan mereka sendiri⁷. Berdasarkan beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya berhasil mengembalikan kondisi yang disebabkan oleh bencana, namun kondisi ini tidak dialami oleh penyandang disabilitas¹.

Penyandang disabilitas ditempatkan dalam kelompok terakhir yang akan dimasukkan dalam proses perencanaan bencana dan bahkan terlupakan, sehingga penyandang disabilitas menjadi kelompok yang belum dimasukkan dalam manajemen bencana dan perencanaan kesiapsiagaan. Hal ini yang menjadi penekanan studi lebih lanjut mengenai mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesiapsiagaan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana.

Isi

Mitigasi sebagai langkah pertama dalam menghadapi bencana, merupakan fase pencegahan yang diikuti oleh fase kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan⁸. Definisi mitigasi mencakup berbagai tindakan yang diambil sebelum suatu kejadian terjadi untuk mencegah penyakit, cedera, dan kematian. Langkah-langkah untuk mengurangi potensi bahaya dengan penekanan pada upaya Pengurangan Risiko Bencana (DRR) dan Manajemen Risiko Bencana (DRM) yang lebih diutamakan dibandingkan hanya fokus pada respon terhadap peristiwa bencana⁹. Prinsip pada mitigasi bencana, yaitu Pengurangan Risiko Bencana (DRR) yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bahaya alam, sedangkan Manajemen Risiko Bencana (DRM) merupakan aktivitas manajemen yang menangani dan berusaha memperbaiki atau mengurangi risiko bencana yang sudah ada⁹.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memberikan definisi: orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat

dengan basis yang sama dengan orang lain. Disabilitas bisa bersifat fisik atau mental, sebagian atau hampir total, sementara atau permanen, dan konstan atau fluktuatif¹⁰. Bentuk disabilitas diantaranya adalah: mobilitas terbatas; buta atau penglihatan parsial; tuli dan gangguan pendengaran; kesulitan kognisi, komunikasi, dan ekspresi; adanya masalah medis; penggunaan sistem pendukung untuk menjaga fungsi vital; gangguan psikiatri dan serangan panik; dan kelemahan yang terkait dengan usia tua.

Individu penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana alam, terutama saat kehilangan anggota keluarga, alat bantu, alat mobilitas, dan adanya hambatan dalam mengakses informasi, sarana, dan infrastruktur. Keadaan ini semakin memburuk jika penyandang disabilitas tidak memiliki akses yang memadai akan pengetahuan dan pelatihan darurat dalam mitigasi bencana⁸.



Gambar 1. Tahapan kerja penanggulangan bencana⁸

Penyandang disabilitas sering kali dikecualikan dari sistem peringatan dini dan evakuasi, hal ini yang dapat mencegah mereka untuk melarikan diri dengan cara yang aman dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan tingkat kematian. Sebagai contoh, setelah Topan Amphan melanda Bangladesh pada bulan Mei 2020, didapatkan bahwa 71% orang dengan kesulitan pendengaran mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses sistem peringatan dini, dan mereka yang berhasil untuk melarikan diri seringkali menghadapi hambatan fisik, serta kekurangan informasi. Hal ini dapat memperlambat akses ke tempat aman dan

mendapat bantuan kemanusiaan, disertai dengan meningkatkan risiko cedera dan trauma yang lebih lanjut¹¹.

Penyandang disabilitas bergantung pada berbagai tingkatan dan jenis dukungan berbasis fungsi, akses terhadap dukungan ini dapat terganggu selama dan setelah bencana. Hambatan yang meningkatkan kerentanan orang dengan disabilitas terhadap bencana termasuk sistem peringatan dini yang tidak dapat mereka dengar, lihat, atau pahami, bangunan dan trotoar yang mencegah pelarian bagi orang dengan keterbatasan mobilitas, keadaan darurat bencana alam yang memisahkan mereka dari alat bantu dan orang atau keluarga yang membantu mereka. Kerentanan orang dengan disabilitas semakin meningkat karena mereka tidak dimasukkan dalam persiapan bencana tingkat masyarakat¹².

Terdapat rekomendasi yang proaktif untuk memberikan pedoman relevan dalam mempertimbangkan isu-isu disabilitas sebelum, selama, dan setelah bencana dengan penekanan empat poin konseptual diantaranya: pengakuan terhadap isu-isu disabilitas dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dengan mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam proses yang lebih luas dari DRR dan pengurangan risiko tambahan yang terkait dengan disabilitas; disabilitas dapat digunakan sebagai lensa untuk identifikasi dan memahami hambatan struktural dan sikap yang lebih besar dalam masyarakat; mempromosikan inklusi penyandang disabilitas dalam kegiatan pengurangan risiko bencana sehingga pengakuan lebih besar terhadap hak asasi manusia untuk kesempatan yang setara; dan membuat program pengurangan risiko bencana yang mempertimbangkan kebutuhan populasi paling rentan seperti orang dengan disabilitas¹³. Beberapa pendekatan inklusif terhadap mitigasi bencana pada penyandang disabilitas, yaitu¹¹:

1. Perencanaan, persiapan, dan pengurangan risiko dengan melakukan pelatihan mengenai proses evakuasi yang inklusif terhadap disabilitas dan penyediaan tempat penampungan atau perumahan publik.
2. Partisipasi yang lebih besar, penyandang disabilitas adalah yang paling tepat untuk identifikasi dukungan dan inklusi yang diperlukan dalam pengungsian, tetapi

mereka jarang diajak berpartisipasi. Untuk memastikan partisipasi yang lebih besar, orang dengan disabilitas harus dimasukkan dalam penilaian kebutuhan sebelum dan selama pengungsian. Mereka juga harus terlibat dalam desain, implementasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi respon terhadap pengungsian, serta dalam manajemen bencana dan pengurangan risiko yang lebih luas.

3. Manajemen data yang lebih baik, diperlukan data mengenai prevalensi, lokasi, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan upaya tersebut. Dalam proses ini, IDPs dengan disabilitas harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data dan melatih tentang praktik inklusif. Pemetaan orang dengan disabilitas dalam suatu komunitas sebelum dilanda bencana mungkin menjadi cara terbaik untuk memastikan inklusi mereka terintegrasi dalam perencanaan manajemen bencana

Dalam mengatasi kerentanan fisik, banyak cara mudah yang dapat dilakukan, dengan mengidentifikasi orang, jenis disabilitas, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan risiko bencana. Langkah berikutnya meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas terhadap risiko yang mereka hadapi dan cara mengatasinya, meningkatkan keselamatan rumah, memindahkan mereka ke tempat-tempat aman dalam kejadian bencana, dan memenuhi kebutuhan khusus mereka setelah keadaan darurat⁸. Keberhasilan implementasi sistem tanggap darurat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan budaya masing-masing, pendekatan konseptual terhadap manajemen risiko bencana, terdiri dari: komitmen politik untuk mengembangkan manajemen risiko bencana yang efektif bagi orang dengan disabilitas; koordinasi dan kontinuitas melalui satu badan administrasi pemerintah sehingga semua informasi yang relevan dikumpulkan dan terpusat; jaringan kerja, dimana setidaknya satu jaringan harus ada yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk bertemu dan bertukar informasi mengenai tantangan yang akan dihadapi dan solusi harus ditemukan; perencanaan strategis melalui organisasi

kegiatan pelatihan dan evakuasi latihan darurat; manajemen pengetahuan; identifikasi dan optimasi sumber daya; serta komunikasi¹⁰.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan selama bencana, terutama selama tanggap darurat termasuk pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana, terutama orang dengan disabilitas, yaitu: fokus pada korban yang terluka karena risiko mengalami disabilitas sementara atau permanen; orang dengan disabilitas harus dimasukkan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi tetapi dengan kebutuhan khusus; penyandang disabilitas berisiko terluka, terjebak, dan terperangkap karena kurangnya kemampuan untuk mengantisipasi dan bereaksi; fokus pada orang dengan disabilitas yang sendirian dan belum menerima bantuan; mengidentifikasi orang dengan disabilitas; dan personal pencarian, penyelamatan, dan evakuasi harus memiliki pengetahuan tentang cara menyesuaikan teknik pencarian dan penyelamatan sesuai dengan jenis disabilitas karena keterbatasan fisik³.

Keterbatasan fisik penyandang disabilitas memerlukan layanan atau fasilitas khusus yang mendukung mobilitas pada saat bencana, desain bangunan berbasis disabilitas diperlukan di bangunan sekolah, kantor, rumah sakit, jembatan, taman, dan jalan umum. Pelatihan dan panduan untuk menangani penyandang disabilitas selama dan setelah bencana sangatlah penting, selain keterlibatan mereka dalam perencanaan persiapan bencana dan upaya mitigasi. Keterlibatan individu dengan disabilitas dalam sistem dan proses manajemen bencana pastinya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat dan pemerintah¹⁴. Orang-orang dengan berbagai disabilitas dari latar belakang yang berbeda memiliki kesempatan untuk bersama-sama merancang kebijakan, sumber daya, atau kegiatan penanggulangan bencana dan rehabilitasi¹².

Ringkasan

Saat kondisi bencana alam, individu dengan disabilitas akan menjadi korban karena memiliki risiko yang lebih tinggi akibatnya sulitnya akses perlindungan diri. Keadaan fisik

maupun mental dapat semakin memburuk akibat dampak bencana alam, bahkan bencana alam dapat menyebabkan peningkatan jumlah individu dengan disabilitas. Meningkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas melalui tahap pra-bencana, bencana, dan pasca-bencana. Pra-bencana: klasifikan berdasarkan daerah, kondisi, dan jenis disabilitas individu, sosialisasikan risiko yang mungkin dihadapi dan strategi penanggulangannya, latih bersama keluarga dan orang terdekat mengenai upaya pengurangan risiko bencana, sampaikan peringatan dini dengan mempertimbangkan jenis disabilitas yang dimiliki, identifikasi kebutuhan selama dan pasca bencana, dan tingkatkan keamanan di rumah dan tempat umum. Saat bencana: pindahkan ke lokasi yang aman dari potensi bencana, berfokus pada individu yang terisolasi dan belum mendapatkan pertolongan, bawa ke tempat pengungsian atau fasilitas medis, lakukan survei dan penilaian dampak bencana, sediakan dukungan konseling dan terapi, serta libatkan dalam upaya pencarian, penyelamatan, dan evakuasi dengan memperhatikan kebutuhan khusus. Pasca-bencana: aktif di pos layanan bencana, tingkatkan pelatihan untuk keahlian penyelamatan diri, dan berikan konseling untuk mengurangi dampak trauma.

Simpulan

Kerentanan orang dengan disabilitas menjadi masalah yang kompleks antara keterbatasan fisik, pengetahuan rendah, dan kemiskinan. Partisipasi masyarakat yang terorganisir dapat menunjukkan hasil yang maksimal dalam mengatasi bencana. Implementasi fungsi mitigasi bencana tentu juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menangani mitigasi bencana. Pengintegrasian bukan hanya untuk memenuhi hak asasi manusia, melainkan melalui program dan kebijakan yang efektif dari tahap pra-bencana hingga tahap pasca-bencana sesuai dengan jenis dan tipe disabilitas.

Daftar Pustaka

1. Winarno, E., Rusmiyati, C. & Probosiwi, R. The involvement of persons with disabilities in disaster risk management. *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 2021. 874.
2. BNPB. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). *PDSI, Pusdatinkom* . 2023. <https://dibi.bnpb.go.id/>.
3. Rahmat, H. K. & Pernanda, S. The Importance of Disaster Risk Reduction Through the Participation of Person With Disabilities in Indonesia. *Batusangkar Int. Conf. V.* 2020. 137–148.
4. Istiarsyah, I., Kamarullah, K., Setiawan, R. & Dawi, A. H. Improving Disaster Preparedness Services for People with Disabilities. *J. ICSAR.* 2023. 7, 248
5. WHO. Disability. 2023. https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1
6. Llewellyn, G. ., Dominey-Howes, D., Villeneuve, M. . & Lewis-Gargett, L. Disability and Disaster Risk Reduction / Emergency Preparedness. 2016.
7. Surwanti, A. & Purwaningsih, T. Participation of Persons with Disabilities in the Disaster Preparedness Program in Kepuharjo Village. *E3S Web Conf.* 2023. 447, 04001.
8. Hayati, A., Bararatin, K., Rizqiyah, F., Defiana, I. & Erwindi, C. Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Sewagati* . 2021. 5, 286–294.
9. Gougelet, R. M. Disaster mitigation. *Ciottone's Disaster Med.* 2016. 160–166 doi:10.1016/B978-0-323-28665-7.00027-3.
10. Alexander, D. & Sagramola, S. Major Hazards and People with Disabilities. 2014. 35.
11. Yasukawa, L. Disability , disasters and displacement. 2021.
12. Villeneuve, M., Dwine, B., Moss, M., Abson, L. & Pertiwi, P. Disability Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR) Framework and Toolkit. 2019. 1–48.
13. Austin, Lord, Bandita, S., Jeevan, B., Obindra, C. & Tracy, G. Disaster, Disability and Difference: A Study of the Challenges Faced by Persons with Disabilities (PwDs) in Post-Earthquake Nepal. 2016.101
14. Twigg, J., Kett, M. & Lovell, E. Disability inclusion and disaster risk reduction. *ODI Brief. Note.* 2018. 1–12.